

DIMENSI INTERNASIONAL KETAHANAN NASIONAL

Juwono Sudarsono

Menjelang akhir abad ke-20 ini, dalam derajat yang berbeda-beda hampir semua negara semakin gencar mengalami 5 desakan yang secara serempak menghentak dan membentur: globalisme, regionalisme, nasionalisme, provinsialisme dan lokalisme.

Hentakan dan benturan itu kita rasakan di Indonesia dengan semakin terkaitnya Indonesia dalam percaturan internasional di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, sains teknologi, militer dan lingkungan hidup dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Darimanapun asal dan apapun latar belakang pendidikan serta profesi para pemimpin nasional, gentingnya kelima hentakan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya perlu dicermati setiap saat. Keterlibatan Indonesia dalam proses GATT/WTO menyadarkan kepada kita semua di pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, tua maupun muda, pria maupun wanita bahwa ketahanan Republik Indonesia akan amat bergantung dari cara para pemimpinnya mampu membaca serta mengambil manfaat dari gelagat globalisasi informasi, perdagangan, investasi, keuangan dan pemasaran sebagaimana disepakati dalam persetujuan GATT/WTO awal Januari 1995.

Pada tataran regional, keterlibatan Indonesia dalam proses APEC/AFTA sejak 1989-1991 semakin

menggugah kita betapa keterkaitan globalisasi/regionalisasi harus diperhatikan dengan seksama. Bagaimanapun juga, ketahanan ekonomi nasional akan amat bergantung pada cara kita semua mencermati tindakan-tindakan yang dilakukan kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang menafsirkan aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam berbagai tahap perkembangan APEC menurut kepentingan masing-masing.

Apa yang dirancang dan dilakukan oleh Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina dan Jepang sekarang

Gurubesar FISIP UI dan Ketua Program Studi Tannas yang banyak menulis buku. Kini menjabat Wakil Gubernur Lemhannas.

Makalah ini merupakan pidato ilmiahnya yang disampaikan pada ulang tahun ke-31 Lemhannas 22 Mei 1996.

dan di tahun-tahun mendatang harus kita cermati karena gerak perekonomian tiga negara besar itu langsung maupun tidak langsung mempengaruhi nasib puluhan juta rakyat Indonesia di berbagai bidang kegiatan. Kita semakin sadar betapa keterkaitan global/regional dalam proses WTO/APEC harus kita rangkakan dengan keterlibatan kita dalam proses ASEAN-AFTA. Menjadi keharusan bagi kita semua untuk memahami jalur-jalur keterkaitan WTO/APEC/AFTA dalam menghadapi jadwal dan batas waktu 2000, 2003, 2010 dan 2020.

Pada tingkat kehidupan nasional, propinsi dan lokal para pemimpin negara semakin harus bijak menjelaskan betapa hentakan regional/global itu tak terelakkan pada kehidupan bangsa pada berbagai jenjang sub-nasional. Kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perihal berbagai kegiatan politik, ekonomi, budaya serta sains dan teknologi secara berulang kali harus dijelaskan dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penyuluhan kepada masyarakat setempat.

Kerjasama SIJORI, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle dan East ASEAN Growth Area memerlukan pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan ekonomi yang wajar pada tiap peringkat penyelenggaraan, termasuk pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa di setiap propinsi. Kejadian-kejadian yang selang 20 tahun terakhir ini tanpa henti-hentinya muncul dalam

pemberitaan media massa terutama yang menyangkut sengketa tanah dan para pekerja kurang terampil menunjukkan betapa gerak kekuatan ekonomi global/regional langsung berdampak pada perdebatan sekitar otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, sengketa sekitar harga tanah dan upah minimum regional serta tuntutan akan keadilan sosial.

Paham kebangsaan - tegasnya Wawasan Nusantara yang berada tepat di tengah-tengah antara globalisme dan lokalisme harus kita pertahankan sebagai kerangka dasar dalam upaya bertarung pada ajang internasional. Wasantara-lah yang menjelaskan kepada sesama warga kita di pelosok-pelosok lokal seperti Kedung Ombo, Timika, Busang, Lhoksumawe, Pekanbaru, Dili, dan ratusan lokal lain di seluruh Tanah Air bahwa globalisasi dan regionalisasi menantang kita untuk teguh dan percaya diri menghadapi pihak luar guna meraih syarat-syarat kerjasama yang lebih baik dan lebih adil dalam merundingkan pengolahan minyak dan gas, tembaga, emas dan sumber kekayaan alam lainnya.

Wasantara-lah pangkal tolak kita untuk berunding, dengan pihak luar bahwa sekalipun kekuatan-kekuatan ekonomi global dan regional menuntut bertambahnya keleluasaan berdagang dan berinvestasi, pemerintah nasional tetap membela kepentingan negara yang mencakup kepentingan propinsi dan kepentingan lokal. Kita mempertahankan sikap bahwa di

ramping perhitungan-perhitungan tentang laba dan dividen bagi pemegang saham perusahaan multinasional, harus ada sumbangan layak yang segera dapat dinikmati masyarakat setempat. Kita harus bersikeras bahwa asas manfaat dan sejahtera itu termasuk mempertimbangkan martabat nilai-nilai kebudayaan setempat.

Kerangka acuan 5 hentakan yang tengah kita alami itu kiranya membentak kita pada upaya penjabaran doktrin dasar Wasantara dan Tannas karena keseluruhan gerak dan hentakan global, regional, nasional, provinsial dan lokal itu pada hakekatnya merupakan paduan dari Trigatra dengan Pancagatra yang kita kenal bersama sebagai Astagatra.

Astagatra pada dasarnya memadukan pertahanan teritorial (membela kedaulatan wilayah) dengan ketahanan fungsional (mengupayakan selisih-selisih keunggulan dalam meraih ilmu, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan manajerial).

Dalam era globalisasi dan regionalisasi yang semakin gencar inilah Lamhannas menyadari bahwa perbedaan-perbedaan luar negeri-dalam negeri, pemerintah swasta, sipil-militer semakin sulit untuk dipisahkan secara jelas. Sebagai negara dan bangsa yang secara nisbi masih lemah dalam mengelola upaya-upaya pembangunan nasional, kita semua ditantang untuk memperkuat kemampuan manajerial kita pada tiap tataran.

Dimensi internasional dari Ke-

tahanan Nasional yang dibahas di sini sudah lama kita ketahui ciri-ciri pokoknya. Akan tetapi karena perkembangan global dan regional kini semakin berdampak langsung pada usaha kita mensukseskan pembangunan nasional, maka uraian singkat ini bermaksud menyampaikan beberapa pokok masalah yang berpengaruh pada ketahanan nasional kini dan di masa-masa mendatang.

Pertama, dalam dunia yang kini dihuni kurang lebih 5.6 milyar manusia, Republik Rakyat Cina mencakup 21.4% dengan 1.2 milyar orang, disusul dengan India sekitar 16.4% dengan hampir 900 juta manusia. Penduduk Amerika Serikat berjumlah 356 juta (3.7%), sedangkan Indonesia dengan 196 juta (1.2%) dan Federasi Rusia sekitar 185 juta dengan 1.1%. Gambaran kasar dari perbandingan jumlah penduduk semata menunjukkan bahwa persaingan untuk memberi hidup pada jumlah penduduk melalui pengadaan kebutuhan pokok (pangan, energi, hunian, pakaian) merupakan upaya besar yang memerlukan perhitungan cermat tentang faktor internasional. Sekitar 1.3 milyar manusia hidup di bawah garis kemiskinan absolut, 600 juta di antaranya secara kronis menderita kekurangan gizi. Setiap tahun sekitar 40 juta orang mati kelaparan, ibarat setiap hari 300 pesawat jumbo jatuh dengan korban tewas semua penumpangnya. Sepuluh dari jumlah itu adalah anak-anak di bawah 15 tahun.

Kita bersyukur bahwa Indonesia bebas dari kesengsaraan, kemelaratan dan kelaparan yang meluas seperti yang terjadi di Asia Selatan dan Afrika bagian selatan. Tetapi kita harus lebih cermati apa arti penambahan penduduk RRC sebesar 17 juta dan penambahan penduduk India sebesar 14 juta setiap tahun terhadap persaingan akses pada bahan energi, pada perluasan pasar dan pada usaha menarik investasi untuk program industrialisasi selama 15-20 tahun mendatang.

Kedua, dari segi produksi pangan, Amerika Serikat menghasilkan sekitar 49% dari jumlah seluruh dunia, diikuti Perancis 15.1%, Kanada 11.6%, Australia 7.5%, Argentina 5%, Thailand 3% dan sisa dunia hanya sekitar 4.2%. Ditinjau dari perbandingan produksi pangan dengan persebaran letak dan jumlah penduduk dunia, jelaslah bahwa makna pangan sebagai kekuatan nasional amat penting dalam pertarungan sekitar pasal-pasal kesepakatan GATT/WTO di bidang pertanian. Masalah pokok bukanlah terletak pada kekurangan produksi pangan sedunia, melainkan ada ketimpangan sistemik dalam distribusinya, yang untuk sebagian besar berada di kendali politik negara-negara Utara dan yang didukung kepentingan meraih laba di pihak perusahaan-perusahaan multinasionalnya masing-masing.

Ketiga, dari segi kekuatan industri manufaktur sedunia, Amerika meraih 22.4% dan Jepang sekitar

17.6%, Jerman mencakup 11.1%, Perancis 5.3%, Inggris sekitar 4.5%, Italia sekitar 5.1%. RRC, Rusia dan India secara bersama hanya mencakup sekitar 7.5%, sedangkan Indonesia sekitar 0.3%. Dari perbandingan angka-angka tersebut jelaslah bahwa aturan permainan perihal hasil-hasil industri sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh negara-negara G-7. Itulah sebabnya ketika memimpin Gerakan Non-Blok selama 1992-1995 Indonesia mengupayakan demokratisasi lembaga-lembaga multilateral agar peluang negara-negara Selatan untuk disertakan dalam penentuan syarat-syarat pengembangan industri dapat ditingkatkan. Ketimpangan itu semakin kentara bila dikaitkan dengan kekuatan jasa komersial, di dalam mana Amerika Serikat meraih 16.2%, Perancis 10.2%, Jerman 6.4%, Inggris sekitar 5.6%, Jepang 5%, Singapura 2.7%. Indonesia kembali meraih sekitar 0.3%. Bagi kebanyakan negara-negara Selatan aturan permainan GATT/WTO tidak pernah wujud dalam bentuk dan isi yang adil dan wajar.

Keempat, dari segi kekuatan sains dan teknologi, Amerika Serikat menduduki tempat teratas dengan menghasilkan 36% dari produk sains dan teknologi sedunia, sekaligus menjadi pasar sains-teknologi terbesar. Bila dijumlah dengan Inggris (8.7%), Jepang (7.7%), Jerman (6.6%), Perancis (5.7%), maka sulitlah bagi negara-negara Selatan untuk melakukan loncatan-loncatan

ke depan bila secara keseluruhan daya lawannya mencakup kurang dari 5% kekuatan sains teknologi dunia. Perolehan Indonesia di bidang ini sementara berada pada tingkat yang sangat rendah.

Abadinya, sebagai contoh perbandingan belumlah adalah dalam kekuatan sains diukur dari pengeluaran anggaran belanja militer. Dalam hal ini Amerika mencakup 42.1% dari keseluruhan pengeluaran anggaran militer sedunia, Rusia 3.9%, Inggris 3.8%, RRC 3.7%, India 1.3%, Australia 0.8% dan Indonesia 0.3%. Dalam masa pasca Perang Dingin, upaya mengalihkan kekuatan industri militer ke arah pengembangan industri sipil masih jauh dari sasaran, sebab dan lain hal karena bertahannya kebijakan yang tertanam dalam industri senjata khususnya senjata konvensional baru maupun sisa-sisa surplus pasca Perang Dingin.

Salah satu contoh dimensi internasional dari ketahanan nasional yang digambarkan di atas mengharuskan kita semua bekerja keras untuk:

1. Mengupayakan keterpaduan dan berjasama yang erat antara pengembangan ketahanan teritorial (*Wasantara*) dengan ketahanan fungsional (*Tummas*). Desakan dan tekanan luar negeri di berbagai bidang di atas membayangkan perbedaan antara faktor luar negeri dan faktor dalam negeri karena daya penetrasi yang amat kuat yang ada pada negara-negara besar dan perusahaan-perusahaan swasta multinasional.

Dalam upaya ini pada satu sisi kita harus membangun segala kemampuan kita sebagai negara-bangsa yang menjaga keutuhan dan kesatuan politik, kesatuan ekonomi dan kesatuan sosial-budaya sebagai bangsa. Pada sisi lain kita harus mengembangkan kemampuan nyata sebagai negara usaha dalam upaya meraih peluang dalam ajang-ajang persaingan yang semakin sulit membedakan antara perang dan damai dan di mana kemenangan hanya bersifat sementara dan sesaat. Dalam perjuangan untuk mengembangkan sebagai negara-usaha ini, maka jadwal-jadwal AFTA dan APEC serta ketentuan umum dalam WTO hendaknya dipakai sebagai tonggak dan rambu yang dinamis. Karena itu, di samping adanya strategi jangka panjang yang diproyeksikan atas dasar gambaran sekarang yang ditarik untuk perkiraan masa depan, kita harus mampu mengembangkan strategi dinamis, sesuai dengan perubahan medan pada setiap tahap perkembangan internasional dan nasional. Oleh karena persaingan ekonomi, sains teknologi dan industri dilaksanakan dalam lingkungan politik militer tertentu, maka perlu dikembangkan paduan jalur AFTA/APEC dengan jalur perkembangan ASEAN Regional Forum (ARF). Hal ini sangat penting mengingat bahwa perkembangan pembangunan nasi-

onal masing-masing negara pada satu saat akan bertemu dalam titik singgung perebutan akses pada sumber energi, baik yang ada dalam kandungan wilayah yang disengketakan maupun yang harus diperoleh melalui jalur-jalur lalu-lintas laut dan udara di sekitar kita.

2. Persiapan kader pimpinan nasional di masa mendatang harus didasarkan pada penjabaran Tannas yang utuh menyeluruh, melintas sektor dan melintas pembahagian kategori-kategori tradisional. Di masa sekarang dan di masa mendatang, pengembangan kader pimpinan nasional harus bersifat ganda dalam pembinaan maupun dalam penggelaran. Setiap perwira menengah semakin harus memperhitungkan kemungkinan mengembangkan minat dan bakatnya di jalur kegiatan non-militer pada masa hidupnya.

Sebaliknya, tenaga-tenaga ahli dari jalur sipil sewaktu-waktu dapat dialihkan untuk mengelola kebijakan pertahanan-keamanan yang lebih memuat keterkaitan antara pertahanan-keamanan dengan ketahanan nasional dalam arti luas. Di masa mendatang pengelola pertahanan-keamanan berangsur-angsur akan lebih bermuatan ekonomi dan sains teknologi daripada bercirikan khusus militer. Jalur pendidikan ganda dan jalur karier yang saling mengisi inilah yang perlu dikembangkan untuk menjabar-

kan ketahanan nasional dalam lingkungan strategis yang makin luas, rumit dan serba berubah.

3. Di dalam negeri kita harus konsisten melaksanakan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Pada tataran nasional golongan ekonomi kuat kerap amat mudah memperoleh akses pada kredit nasional dalam upaya mengatasi kemacetan yang melanda alamnya dari waktu ke waktu. Struktur kredit yang timpang inilah yang terasa kurang menjangkau dan menyantun golongan ekonomi menengah dan lemah secara melembaga. Seringkali kemudahan ini diperoleh dari keterkaitannya dengan sumber-sumber dana modal internasional. Selang lima tahun terakhir telah ada upaya keras untuk membatasi penyaluran bagi golongan ekonomi kuat yang menguasai lebih dari 60% kredit yang tersedia. Tetapi pemerintah harus lebih kuat lagi mengupayakan agar ketimpangan dalam pembangunan dan penyaluran kredit nasional itu berangsur-angsur lebih berpihak pada golongan ekonomi menengah dan golongan ekonomi lemah. Komitmen ini harus merupakan konsensus politik yang mampu dilaksanakan secara nyata agar supaya gejala kecemburuan sosial antar golongan tidak menjurus pada gejala dan disintegrasi nasional.
4. Di Indonesia, ketimpangan kultur

masih berlaku dalam perdagangan dalam negeri, yang cenderung dikuasai oleh golongan ekonomi kuat yang melaksanakan kerjasama dengan perusahaan multinasional. Sebagian kecil dari tenaga produksi, pemrosesan dan pemasaran perdagangan dalam negeri sudah dilaksanakan oleh golongan ekonomi menengah dan lemah. Akan tetapi, bila dilihat dari skala permasalahan yang harus diatasi untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, maka keadilan dan tindakan politik harus lebih nyata dan lebih cepat dirasakan berpihak pada kalangan golongan menengah yang sedang tumbuh, agar gejolak sosial ekonomi tidak mengarah pada huru-hara politik, baik yang sporadis maupun yang berkepanjangan.

5. Dalam upaya meningkatkan kemampuan ketahanan nasional, unsur yang amat penting adalah menjaga garis belakang, terutama usaha untuk lebih luas dan lebih cepat menyelamatkan bagian terbesar dari rakyat Indonesia yang tertinggal. Bila tugas-tugas persaingan ditangani oleh kalangan pimpinan nasional, maka tugas lebih berat dipikul oleh pimpinan daerah dan pimpinan lokal yang secara langsung berhadapan dengan ujung tombak permasalahan di lapangan. Harapan-harapan yang dihadirkan melalui media internasional semakin menyulitkan pemenuhan tuntutan-tun-

tuhan sosial, ekonomi dan politik yang muncul silih berganti di tataran praksis.

Demikianlah sekilas beberapa masalah pilihan yang kiranya harus kita hadapi dan tangani bersama dalam mengupayakan agar Indonesia bertahan hidup menghadapi berbagai jenis tantangan berat dari luar negeri. Kesulitan pokok bagi kita adalah bagaimana membuat keseluruhan agenda di atas dirasakan sebagai hal-hal yang gawat dan segera ditangani dengan secermat- cermatnya. Di masa-masa lampau kegentingan itu mewujudkan sebagai konsensus politik yang mendorong pemusatan perhatian dan kesatuan tekad dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Untuk 25 tahun berikutnya, kiat kepemimpinan nasional yang dicari adalah bagaimana konsensus akan gentingnya masalah-masalah itu dipelihara secara melembaga melintas semua profesi dan semua generasi.